

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 13/KP.01.03/BM/02/2026
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, diperlukan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk melaksanakan tugas pada setiap sub bagian;
- b. Bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku ini, selain telah melalui proses evaluasi dan dipandang cakap, juga sesuai ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor SP DIPA-115.01.2.686484/2026, 22 Desember Tahun 2025
2. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 01/HM.03.02/K.BM/01/2026, tanggal 05 Januari 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Sub-Sub Bagian Lingkup Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2026 sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman Uraian Tugas masing-masing Sub Bagian yang ditetapkan oleh Kepala Bagian masing-masing
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2026, dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
:

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 11 Februari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

NURBANDI LATARISSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 13/KP.01.03/BM/02/2026
TANGGAL : 11 Februari 2026
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU TAHUN 2026

NO	UNIT KERJA/NAMA	JABATAN	KET
I. BAGIAN ADMINISTRASI			
A. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMN			
1.	NARTO KAIMUDIN	PERENCANA AHLI PERTAMA	PPPK
2.	GERY SAMLELAWAY	PERENCANA AHLI PERTAMA	PPPK
3.	STELLA SIMATAU	PERENCANA AHLI PERTAMA	PPPK
4.	HAMISA LATUCONSINA	PERENCANA AHLI PERTAMA	PPPK
5	MIRA HUSEIN OBET	PERENCANA AHLI PERTAMA	PPPK
B. SUB BAGIAN SDM DAN UMUM			
6.	ROSITA HELUTH	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	PPPK
7.	HANIATI PALTAN REGO	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	PPPK
8.	SAMUEL R. OHOIULUN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PPPK
9.	WELLEM SOPLERA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PPPK
II. BAGIAN PENGAWASAN			
10	ELSINA MUAL	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	PPPK
11	PATTY WHITLE UNTAYANAN	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	PPPK
12	IBO SAPUTRA G. LABAYONI	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	PPPK
13	GABRIELA WAILERUNY	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	PPPK
14	HALIM MARASABESSY	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PPPK
15	SAMSUDIN LA MONDO	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PPPK

16	DADANG SUHERMAN	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PPPK
17	NORMA ROVITA BUAMONA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK
18	FATUM THALIB	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK (MELAKSANAKAN TUGAS DI BAGIAN SDM SEBAGAI PENGELOLA KEPEGAWAIAN SESUAI ST SEKJEN)
19	ABUBAKAR NGABALIN	PENGADMINISTRPRAASI PERKANTORAN	PPPK
20	BOBI P. TUTUHERU	PENGADMINISTRPRAASI PERKANTORAN	PPPK
21	MUHAMMAD RAMDANI SAHUPALA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI MUDA	PPPK
III. BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA A. SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN			
22	RONY THENU	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	PPPK
23	KLARISHA SIAHAYA	PENATA LAYANAN OPERSIONAL	PPPK
24	RIVALDO TAMTELAHITU	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PPPK
B. SUB BAGIAN PENYELSAIAN SENGKETA			
25	ASSYATRI ALMOHDAR	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	PPPK
26	SUMARNI BUGIS	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	PPPK
27	PARMAN LATUA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PPPK
28	FARID TOISUTA	PENATA LAYANAN OPERSIONAL	PPPK
29	ERNO PATIMAHU	PENATA LAYANAN OPERSIONAL	PPPK
30	THAMRIN HITIMALA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU AHLI PERTAMA	PPPK

IV. BAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI			
31	FRANDO UDIMERA	PRANATA HUMAS AHLI PRATAMA	PPPK
32	JOHNY H. LEWAHERILLA	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK
33	NURUL KISWAH USEMAHU	PRANATA KOMPUTER AHLI PRATAMA	PPPK
34	RIYALDI ACHMAD	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PPPK
35	ASRID PAPILAYA	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PPPK
36	MUSTAKIM HAHUAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PPPK
37	AHMADI OHOIWUTUN	PRANATA HUMAS AHLI PRATAMA	PPPK

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 11 Februari 2026

KEDAI A SEKRETARIAT,

NURBANDI LATARISSA